

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Pada dasarnya Politik Luar Negeri Cina dalam isu Rohingya di Myanmar menjadi suatu hal yang sangat menantang untuk dijadikan pengkajian dan analisa lebih lanjut. Dalam hal ini penulis mengangkat permasalahan terkait Politik Luar Negeri Cina di Myanmar yaitu dengan judul “ politik luar negeri Cina terhadap isu Rohingya di Myanmar 2014-2017”. Topik permasalahan ini dapat di katakan fluktuatif yaitu terkadang memburuk dan terkadang dingin.

Alasan penulis mengangkat judul ini, adanya hubungan kedua negara yang terjalin sudah cukup lama antara Cina dengan Myanmar. Kedua negara ini menjalin hubungan diplomatik dan menjalin beberapa kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan kedua negara ini nantinya akan mempengaruhi masalah luar negeri maupun dalam negerinya hal ini sudah terlihat pada masalah yang ada di Myanmar yaitu isu Rohingya dimana Cina ikut andil dalam permasalahan ini.

Sebagaimana diketahui isu Rohingya ini menjadi sorotan dunia internasional akibat kasus kemanusiaan yang merenggut ribuan korban jiwa sehingga Myanmar sebagai negara mendapat kecaman keras akibat tidak dapat menyelesaikan isu kemanusiaan etnis Rohingya. Masalah ini dikhawatirkan oleh dunia internasional semakin berat diselesaikan karena Cina ikut berperan dalam masalah domestik di Myanmar terhadap krisis kemanusiaan tersebut. Dalam hal ini penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut politik luar negeri Cina terhadap isu Rohingya di Myanmar.

## B. Latar Belakang Masalah

Cina merupakan Negara di Kawasan Asia Timur yang mampu lolos dalam “*Krisis Keuangan Asia*” pada tahun 1997. Cina memperlihatkan kekuatannya dengan lolos tanpa cidera dalam mengatasi krisis ini dan meninggalkan negara-negara lainnya seperti Indonesia, Thailand, Korea Selatan dan Malaysia saat krisis keuangan ini melanda kawasan Asia. Kebangkitan ekonomi Cina sepanjang decade 1990-an menimbulkan berbagai tanggapan dikalangan negara-negara lainnya karena sebelumnya Cina, berada dalam lingkaran pertumbuhan tanpa perkembangan. Rakyatnya rata-rata pada tahun 1950 menjalani kehidupan sama seperti yang mereka jalani satu millennium sebelumnya. Pada tahun 1990 Cina dapat kita katakan mengalami transformasi yang pesat. Cina benar-benar seperti naga yang terbang melesat naik ke udara kemudian menguasai angkasa raya. Segala aspek kehidupan Cina berubah seketika baik dalam ekonomi, sosial, politik kesenian. Namun masih ada bagian dari Cina yang tertinggal, tapi bagian Cina yang maju sungguh menggemparkan dunia (Wibowo, 2004).

Kemajuan perekonomian Cina ini tidak terlepas dari faktor sejarah yaitu revolusi kebudayaan dimana suatu revolusi dan tujuan dalam menumbangkan unsur-unsur partai komunis yang menganut jalan kapitalis. Kini Cina tumbuh dan berkembang menjadi negara industri dengan banyaknya jumlah perusahaan-perusahaan asing maupun domestik yang berada di Cina. Perusahaan-perusahaan domestik yang ada di Cina mayoritas adalah perusahaan besar dengan power yang kuat bagi dunia internasional seperti *Petro Cina*, *Cina National Petroleum Corporation* (CNPC), *Cina Petroleum Chemical Corporation* (Sinopec), dan *Cina National Offshore Oil Corporation* (CNOOC). Perusahaan tersebut telah menjamur di berbagai negara di dunia dengan berinvestasi dan membuat anak perusahaan di negara-negara ladang migas, salah satunya di negara Myanmar (Prasetyo, 2014).

Myanmar atau sering dikenal dengan Burma merupakan negara yang memiliki ikatan sejarah cukup kuat dengan Cina baik dalam hubungan diplomasi maupun ekonomi. Hubungan kedua negara tersebut telah terjalin cukup lama di mulai dengan Myanmar yang mendukung kemerdekaan Cina. Myanmar yang pada saat itu masih di pimpin oleh U Ne Win mengadakan kunjungan resmi ke Cina atas undangan dari pemerintah Cina pada tanggal 27 April – 3 Mei 1977. Kunjungan itu merupakan kunjungan ketiga dari Myanmar, kunjungan yang pertama pada bulan Januari 1960 yang mana pada akhirnya membawa kesepakatan dengan penandatanganan sebuah perjanjian persahabatan antara kedua negara tersebut. Hubungan antar kedua negara tersebut saling menjaga dan melindungi dari masalah-masalah yang dapat mengganggu hubungan mereka sehingga Myanmar terus memperkuat hubungannya dengan Cina. Baik Cina maupun Myanmar sering berkunjung untuk berdiplomasi demi masa depan keduanya. Myanmar-Cina sendiri memiliki hubungan istimewa yaitu adanya hubungan perdagangan dari Cina ke wilayah kawasan pantai dan lepas pantai di Teluk Bengal yang membuat hubungan Myanmar dan Cina semakin dekat. Hubungan keduanya yang tampak akrab hingga mendapat julukan “*Paukaw*” yang berarti keluarga ataupun kawan karenanya hubungan Cina dan Myanmar sangat erat dan saling mempengaruhi satu sama lainnya (Sudibjo, 1979).

Baru-baru ini Myanmar sedang di guncang oleh masalah domestiknya yaitu isu etnis Rohingya. isu yang berkembang di Myanmar ini tidak luput dari faktor sejarah dari pembentukan Myanmar itu sendiri. Upaya pemerintah pusat yang didominasi oleh etnis Burma untuk melakukan Burmanisasi terhadap beberapa kelompok etnis yang merupakan sumber konflik dan instabilitas domestik sehingga banyak etnis minoritas dituntut untuk melakukan proses asimilasi yang mengakibatkan perlawanan. Hal ini lah yang menjadikan Myanmar rawan dengan konflik etnis. Dewasa ini Myanmar juga di landa konflik etnis yaitu etnis Rohingya. Konflik etnis Rohingya ini merupakan konflik yang didasari oleh perlakuan diskriminasi karena perbedaan agama dan

etnis. Selain itu banyak etnis Rohingya yang mengalami kekerasan yang mana dikatakan oleh Campbell dan Dillon bahwa kekerasan yang dilakukan sekaligus menjadi penawar karena secara bersama-sama negara modern dirancang untuk melindungi rakyatnya dari kekerasan namun juga membuat negara modern menjadi tempat perlindungan terhadap kekerasan. Hal ini harusnya menjadikan Myanmar sebagai tempat bagi perlindungan etnis Rohingya namun faktanya justru sebaliknya.

Etnis Rohingya tidak diakui keberadaannya oleh Myanmar dan tidak mendapatkan kewarganegaraannya, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya peraturan kewarganegaraan Myanmar (*Burma Citizenship Law 1982*) yaitu Myanmar menghapus Rohingya dari daftar delapan etnis utama yaitu Burmans, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan dan dari 135 kelompok etnis kecil lainnya (Linklater, 1996).

Krisis Rohingya ini menjadi sorotan dunia internasional terlebih dengan riwayat hubungan keduanya yang sangat dekat. Cina menjadi ancaman bagi negara-negara yang ingin memberikan sanksi terhadap pelanggaran HAM di Myanmar karena Myanmar sendiri merasa terlindungi oleh Cina. Sebelum terjadinya isu Rohingya ini, Myanmar pernah melakukan pelanggaran HAM juga terhadap jenderal Ne Win tahun 1962. Banyak yang mengecam aksi itu namun meskipun demikian Cina masih menjadi sekutu tunggal bagi Myanmar. Hal itulah yang dikhawatirkan oleh banyak negara terhadap Cina saat ini yang mana Sikap menolak yang ditunjukkan oleh Cina terhadap resolusi PBB ini berarti seolah Cina mendukung Myanmar secara diplomatis dalam isu Rohingya (Cipto, 2007).

Cina bersikap seolah bungkam sementara ia sebenarnya secara diam-diam telah menyetujui pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar yang seharusnya bertindak tegas dalam mengatasi permasalahan pelanggaran HAM etnis Rohingya namun faktanya, Cina bertindak sebaliknya (Rube, 2017).

Hal ini kemudian membuat masyarakat internasional kecewa terlebih saat Perserikatan Bangsa-Bangsa bersiap

membentuk badan untuk mempersiapkan bukti pelanggaran HAM di Myanmar, justru sikap yang ditunjukkan Cina (didukung oleh Rusia) adalah dengan menentang langkah maupun memblokir rencana dewan keamanan (DK) PBB tersebut. Selain itu Cina bermaksud untuk tidak menginternasionalisasikan isu Rohingya karena isu ini dianggap hanya membelit dua negara saja yaitu Myanmar dan Bangladesh sehingga Cina memandang bahwa permasalahan di Myanmar merupakan urusan internal dari sebuah negara yang berdaulat sehingga Pemerintah Myanmar dan kelompok-kelompok yang berkonflik harus diberi ruang untuk melakukan usaha rekonsiliasinya sendiri maka dari itu Cina tidak ingin terlibat dalam isu tersebut dan berharap kedua negara dapat menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi tanpa campur tangan negara lainnya. maka dari itu Cina menolak draft resolusi yang dibuat oleh PBB terhadap isu Rohingnya ini. Hal ini yang menjadi pertanyaan bagi kita mengenai sikap yang di tunjukkan Cina sebagai negara yang telah menyetujui pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar (Asia/jakarta, 2017).

### **C. Rumusan Masalah:**

Berdasarkan rangkaian latar belakang masalah diatas mendorong penulis untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut: **Mengapa Cina menolak Resolusi PBB terhadap isu Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) etnis Rohingya di Myanmar?**

### **D. Kerangka Berpikir**

Untuk menjawab Rumusan Masalah diatas, maka penulis menggunakan:

## 1. Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional biasa di kenal dengan “*Nasional Interest*” adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan pemerintahan nasional dalam level internasional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kepentingan nasional dari suatu negara adalah untuk menjaga otonomi politik dan integrasi nasionalnya demi keberlangsungan kesejahteraan masyarakatnya sampai ke tahap internasional. Secara garis besar kepentingan nasional adalah tujuan, cita-cita dan harapan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Dengan tercapainya kepentingan nasional maka kehidupan negara tersebut akan berlangsung stabil dan baik dalam segi ekonomi, politik, maupun pertahanan keamanan. Kepentingan nasional memiliki makna bahwa tujuan yang sangat mendasar dan tak kalah penting dalam memandu para pembuat keputusan untuk merumuskan politik luar negerinya.

Beberapa tokoh politik internasional terkemuka mengemukakan pendapatnya mengenai definisi kepentingan nasional diantaranya adalah Hans Morgenthau yaitu seorang pendukung terkenal aliran realis dalam hubungan internasional. Morgenthau mengatakan bahwa strategi diplomasi harus di motivasi oleh kepentingan nasional dan bukan oleh kriteria moralistik, legalistik, dan ideologi yang utopia dan berbahaya. Menurut Morgenthau :

*”Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik”* (Theodore A. Couloumbis, 1999).

Dalam hal ini kepentingan nasional yang relative tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan

wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini meliputi keamanan (*security*) dari kesejahteraan (*prosperity*). Kepentingan nasional di identikan dengan “tujuan nasional” contohnya kepentingan dalam pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kepentingan dalam pembangunan ekonomi maupun kepentingan menarik investasi asing untuk mempercepat laju industrialisasi.

Namun di balik itu ada kepentingan yang melatarbelakangi interaksi tersebut. Negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional, juga memiliki kepentingan yang melatarbelakangi mereka dalam melaksanakan hubungan internasional dengan negara lain. Kepentingan tersebut umumnya disebut dengan *national interest* atau kepentingan nasional. Interest merupakan salah satu dari esensi hubungan internasional disamping actors dan power. Tidak ada definisi pasti mengenai kepentingan nasional itu sendiri. Namun pada intinya konsep kepentingan nasional merujuk pada tujuan kesejahteraan pemerintah nasional pada tingkat internasional, seperti penjagaan kemerdekaan politik dan integrasi teritorial. Pengertian kepentingan nasional sendiri dapat dijelaskan dalam dua aspek yaitu:

- a. Kepentingan nasional adalah kebaikan bersama bagi masyarakat. Definisi ini melihat masyarakat sebagai sebuah komunitas dengan hubungan yang saling menghormati, menghargai, serta mengikat anggotanya secara bersama-sama. Dapat dikatakan, kepentingan nasional pada aspek ini dilihat secara umum yaitu sebagai ungkapan untuk kebaikan bersama bagi masyarakat.
- b. Kepentingan nasional menyatakan pada prinsip berdiplomasi dengan mengedepankan kebaikan bersama dari masyarakat dalam hubungannya dengan unit nasional lainnya sebagai tujuan akhir dari aksi diplomasi. Dalam hal ini kepentingan nasional merupakan tujuan negara yang ingin mempertahankan atau menambah kekuasaannya.

Kepentingan nasional juga dapat di jelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang

mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Maka dari itu, kepentingan nasional sangat erat kaitannya dengan *Foreign Policy* atau kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri merupakan *action theory*, yaitu kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, kebijakan politik luar negeri ini adalah suatu perangkat formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam peredaran dunia internasional.

Dua hal yang mendasari pelaksanaan kepentingan nasional yaitu dengan rasionalitas dan moralitas. Jika pelaksanaan kepentingan nasional hanya didasari oleh rasionalitas, kepentingan nasional bisa saja tidak bermoral karena rasionalitas mengacu pada preferensi aktor itu sendiri. Hal ini dapat dijawab oleh Moralitas dengan dilaksanakannya *national interest with morality*, kepentingan nasional akan dilakukan sesuai dengan moral-moral yang ada dalam masyarakat misalnya pemerintah yang bersifat diktator. Menurut pemerintah, kediktatoran merupakan hal yang rasional karena dengan sistem tersebut pemerintah dapat dengan mudah mengatur negara. Namun, kediktatoran melanggar moral seperti hak asasi manusia.

Menurut Nuechterlein terdapat empat kepentingan dasar yang mendorong suatu negara menjalankan kepentingan nasional yaitu:

- a. Kepentingan pertahanan  
Kepentingan pertahanan yaitu kepentingan suatu negara dalam melindungi penduduk dan bangsa-bangsa dari ancaman kekerasan fisik oleh negara lain.
- b. Kepentingan ekonomi  
Kepentingan ekonomi yaitu kepentingan suatu negara untuk meningkatkan perekonomian negaranya dengan menumbuhkan relasi maupun kerjasama dengan negara lain. Sudut pandang atau dimensi dari kepentingan nasional dibagi menjadi 2 yaitu *core* /



*basic / vital interest* (kepentingan vital) dan *secondary interest* (kepentingan sekunder).

c. Kepentingan tatanan dunia

Kepentingan tatanan dunia yaitu kepentingan untuk mempertahankan politik internasional dan sistem ekonomi dimana suatu bangsa-negara merasa aman dan penduduk bisa beroperasi secara damai diluar negaranya.

d. Kepentingan ideologi

Kepentingan ideologi adalah kepentingan negara untuk melindungi nilai-nilai ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain.

Dari keempat kepentingan dasar tersebut kita dapat tiga kepentingan nasional Cina di Myanmar yaitu *pertama*, kepentingan tatanan dunia. Terkait dengan Kepentingan *Tatanan Dunia*, Cina telah menjadi sekutu Myanmar yang sangat setia dimana Cina terlibat di berbagai perang etnis selama beberapa dekade di Myanmar. Bahkan Cina menjadi satu-satunya negara yang bertahan menjadi sekutunya, saat banyak negara mengecam aksi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Myanmar terhadap jenderal Ne Win tahun 1962. Dari kedekatan tersebut, baik Cina maupun Myanmar, saling menjaga dan melindungi dari masalah-masalah yang dapat mengganggu hubungan internasional mereka.

*Kedua*, kepentingan *Ekonomi*, terdapat sudut pandang dari kepentingan nasional yang terbagi menjadi kepentingan vital ( *vital interest* ) dan kepentingan sekunder ( *secondary interest* ). Pertama, kepentingan vital adalah kepentingan yang sangat tinggi nilainya sehingga suatu negara bersedia untuk berperang dalam mencapainya. Contohnya melindungi daerah-daerah wilayahnya, menjaga dan melestarikan nilai-nilai hidup yang dianut suatu negara. Kedua, kepentingan sekunder meliputi segala macam keinginan yang hendak di capai masing-masing negara namun mereka tidak bersedia berperang dimana masih terdapat kemungkinan lain untuk mencapainya, dengan cara menjalin hubungan internasional. Aktor utamanya adalah kepentingan nasional Cina terkait ekonomi di Myanmar. Hubungan kedua negara tersebut terjalin sudah

lama sejak kemerdekaan Cina. Myanmar menjadi negara pertama yang mendukung dan mengakui kemerdekaan Cina.

Kedekatan ini kemudian dimanfaatkan oleh Cina yang sedang mengalami ketergantungan terhadap sumber energi karena Cina tidak dapat memenuhi kebutuhan sumber energi dalam negerinya. Maka dari itu, Cina melakukan strategi diplomasi dan melakukan hubungan bilateral dengan Myanmar dalam bisnis minyak dan gas alam. Diketahui pula bahwa Cina sudah melakukan strategi bisnis dengan membuat anak perusahaan di Myanmar yang bergerak dalam bidang minyak dan gas alam yaitu *Petro Cina*, *Cina National Petroleum Corporation* (CNPC), *Cina Petroleum Chemical Corporation* (Sinopec), *Cina National Offshore Oil Corporation* (CNOOC). Selain itu investasi Cina di luar negeri merupakan bentuk lain dari kontribusi Cina terhadap perekonomian global. Dari banyaknya investasi yang dilakukan Cina, Myanmar merupakan negara yang termasuk dalam tujuan utama investasi Cina.

*Ketiga*, kepentingan pertahanan. Saat ini, Cina menjadi negara yang sangat berpengaruh bagi dunia salah satunya dalam perekonomiannya. Hal ini tentu dimanfaatkan oleh Cina untuk dapat mempertahankan posisinya tersebut agar negara lain bergantung terhadap perekonomian Cina sehingga Cina akan dipandang menjadi negara yang besar dan kuat dan tentunya Cina tidak akan dianggap remeh oleh negara lain. Kini, Cina telah berhasil masuk dalam kawasan Asia untuk menancapkan pengaruhnya dalam perekonomian dunia agar negara-negara Asia mengikuti jejak dari Cina sehingga berhasil menjadi negara yang besar saat ini. jejak ini lah yang menghantarkan Myanmar menjadi negara yang terbuka agar dapat mengikuti jejak Cina sehingga, banyak perusahaan asing yang masuk ke Myanmar salah satunya perusahaan dari Cina itu sendiri (Fathullah, 2018).

## **2. Konsep Sphere of influence**

Sphere of Influence in international politics, the claim by a state to exclusive or predominant control over a foreign area or territory. The term may refer to a political claim to exclusive control, which other nations may or may not

recognize as a matter of fact, or it may refer to a legal agreement by which another state or states pledge themselves to refrain from interference within the sphere of influence (Tuju, 2013).

Dalam konteks politik internasional, definisi *Sphere of Influence* adalah klaim kontrol atau dominasi dari suatu negara terhadap suatu kawasan. Selain itu adapun yang mendefinisikan bahwa *Sphere of Influence* adalah wilayah dalam satu negara dimana negara lain mengklaim hak eksklusif tertentu dengan tingkat kontrol yang di berikan oleh kekuatan asing tergantung pada jumlah kekuatan militer yang terlibat dalam interaksi kedua negara, pada umumnya. Meskipun demikian definisi sesungguhnya mengenai Sphere of Influence sendiri saat ini belum bisa benar-benar didefinisikan dalam satu arti sama seperti yang dikatakan oleh seorang akademisi bernama Susanna Hast, sekaligus penulis buku *Spheres of Influence on International Realties: History, Theory and Politics*.

Dalam hal ini, Sphere of Influence diartikan sebagai suatu wilayah yang terdiri dari negara-negara yang kecil yang kemudian dikuasai oleh negara yang besar dan kuat, selain itu letak geografisnya yang berdekatan serta memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga memunculkan keinginan untuk memperluas pengaruhnya demi kepentingan negaranya sendiri. Apabila dilihat dari teori yang digunakan pada suatu wilayah yang mendapatkan klaim hegemoni dari kekuatan luar yang memiliki dominasi atau kontrol yang besar agar dapat mengamankan monopoli ekonomi di wilayah itu seperti penjajahan. Seperti hal nya yang dilakukan oleh Cina terhadap Myanmar. Berdasarkan letak geografis Cina dengan negara-negara ASEAN salah satunya yaitu Myanmar memiliki jarak yang berdekatan serta bisa dikatakan bahwa Myanmar masih menjadi negara yang lemah karena banyak nya masalah yang terjadi disana. Sebab itu Cina ikut andil dalam isu di Myanmar yang membuktikan jelas bahwa pengaruh Cina di Kawasan asia tenggara sangat kuat terlebih lagi di Myanmar.

Hubungan yang terjalin antara Cina dan ASEAN dapat dikatakan cukup baik sehingga bagi Cina, ini merupakan

kesempatan emas untuk terus mendekati negara-negara yang menjadi tujuan utama untuk investasi Cina itu sendiri. Terlebih Cina di abad-21 ini menjadi negara yang sangat berpengaruh dalam perekonomian global sehingga dengan mudah mengontrol negara yang kecil seperti Myanmar. Baru-baru ini Cina juga sangat dekat dengan Myanmar menjalin kerjasama dalam bidang migas dan pertambangan. Hal ini merupakan strategi Cina untuk mendapatkan sumber energi milik Myanmar yang di perkirakan memiliki cadangan migas sebesar 11 sampai 23 triliun kaki kubik, dan hasil tambang yang baru-baru ini ditemukan yaitu batu giok yang diperkirakan senilai US\$ 170 juta atau sekitar Rp 2,2 triliun yang berada di negara bagian Kachin, di utara Myanmar. Tentu saja ini mengundang banyak negara untuk mendapatkan kontrak mengeksplorasinya tak terkecuali juga Cina. Sebab itu, *Sphere of Influence* dalam penelitian ini akan digunakan sebagai teori yang menjelaskan *Economic Behavior* Cina-Myanmar sebagai negara yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Melihat hal ini, penulis menarik benang merahnya bahwa Cina menggunakan kepentingan nasional dan juga *Sphere of Influence* sebagai senjata mencari keuntungan di Myanmar di tengah isu krisis Rohingya. Kepentingan nasional Cina yang berinvestasi di Myanmar dalam bidang minyak dan gas mendapat sambutan hangat terlebih Cina melakukan *Sphere Of Influence* terhadap Myanmar yang bergantung terhadap Cina.

## **E. Hipotesis**

Cina menolak resolusi PBB terhadap isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) etnis Rohingya di Myanmar karena:

1. Cina ingin memperkuat pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara.
2. Cina memandang bahwa Myanmar adalah aset penting bagi masa depan Cina serta sebagai jalur darat/laut dalam proyek *One Belt One Road* (OBOR).

3. Kepentingan Cina dalam bidang pertambangan yaitu batu giok yang berada di negara bagian Kachin, Myanmar.

## **F. Tujuan Penelitian**

Penulisan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis yang dibuat dalam penelitian tentang:

1. Sikap menolak Cina sebagai salah satu negara yang menyetujui adanya pelanggaran HAM, terhadap etnis Rohingya di Myanmar.
2. Motif Kepentingan Nasional Cina di Myanmar terhadap isu Rohingya pada tahun 2014-2017.
3. Pengaruh Cina sebagai negara besar di kawasan Asia dalam isu Rohingya di Myanmar.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Batasan waktu yang digunakan untuk menganalisis Politik Luar Negeri Cina terhadap isu Rohingya di Myanmar adalah Tahun 2014. Di tahun inilah Tepatnya bulan juni 2014 Badan Pengungsi Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) melaporkan bahwa sekitar 53 ribu warga etnis Rohingya berangkat dari pelabuhan Bangladesh–Myanmar menuju Malaysia. Hal ini dikarenakan etnis Rohingya mengalami kekerasan, kehilangan tempat tinggal mereka, dan terjadi banyak pelanggaran HAM yang di lakukan oleh junta militer sehingga mengakibatkan mereka mengungsi ke negara tetangga. Angka ini meningkat 61 persen dari tahun sebelumnya Namun, setelah itu pemerintah memberikan 40 ribu kewarganegaraan bagi etnis Rohingya. Hal ini menjadi secercah harapan bagi mereka dengan diakui nya mereka sebagai warga dari Myanmar, Meskipun sudah banyak etnis yang diakui kewarganegaraannya namun masih ada etnis Rohingya yang terus menerus mendapatkan diskriminasi (Indonesia, 2014).

Pada tahun 2017 tepatnya tanggal 5 Desember terdapat sidang dewan hak asasi manusia PBB untuk mengutuk pelanggaran HAM berat di Myanmar khususnya terhadap Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Draft resolusi tersebut ditentang oleh tiga negara, salah satunya Cina. Posisi Cina sebagai pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB dinilai bisa menghambat penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar.

Namun sebelumnya, pada tahun 2017 tepatnya pada 28 September, Dewan keamanan (DK) PBB menggelar rapat terbuka pertama membahas krisis yang disebut sebagai "pembersihan etnis" dalam delapan tahun terakhir ini. Keputusan ini di ambil melihat jumlah pengungsi Rohingya yang semakin banyak hingga 500 ribu orang melarikan diri dari kekerasan tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh Myanmar ini banyak dikecam oleh sejumlah duta besar negara di dunia internasional karena dinilai seperti pembersihan etnis. Dengan hal ini Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengirim pesan keras terhadap Myanmar (Sofwan, 2017).

## **H. Metode Penelitian**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang menggambarkan dengan menggunakan fakta-fakta yang memanfaatkan data sekunder yang didapatkan melalui buku, jurnal, surat kabar, website dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang nantinya akan dibahas dalam skripsi ini. Disisi lain dalam teknik pengumpulan data, menggunakan penelitian pustakan (*library research*) yang memanfaatkan data-data atau bahan-bahan yang ada di perpustakaan untuk mendukung penelitian yang diperoleh melalui buku, jurnal, surat kabar, website, dan bahan lainnya yang sesuai dengan topik yang akan diteliti dan dapat diuji kebenarannya.

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini terdapat 5 bab besar yang menjelaskan topik skripsi. Kemudian terdapat pula sub bab-sub bab untuk lebih memperinci penjelasan dari bab-bab besar yang sebelumnya. Hubungan antar bab didalam skripsi ini disusun secara sistematis agar lebih memudahkan bagi para pembaca dalam memahami isi skripsi, sebagaimana berikut:

**BAB I** Berisi garis besar penelitian meliputi alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan bab-bab selanjutnya.

**BAB II** Penulis memaparkan dasar-dasar politik luar negeri Cina yaitu Pembentukan Cina Sebagai Sebuah Negara, Kepentingan dasar politik luar negeri Cina, Politik luar negeri Cina di kawasan Asia Tenggara dan politik luar negeri Cina di Myanmar.

**BAB III** Penulis memaparkan sikap Cina menolak resolusi perserikatan bangsa-bangsa terhadap isu Rohingya di Myanmar yang berisi tentang: Krisis kemanusiaan etnis Rohingya, Berbagai kecaman internasional terhadap Myanmar dan Cina bersikap menolak resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa terhadap isu Rohingya di Myanmar.

**BAB IV** Penulis memaparkan kepentingan nasional Cina yang berisi: Kepentingan ekonomi Cina, Myanmar sebagai Aset Penting bagi Cina sekaligus menjadi penopang Proyek OBOR (*One Belt One Road*), dan Kepentingan Cina dalam bidang pertambangan di Myanmar.

**BAB V** Penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang di peroleh dari bab I sampai bab IV yang juga menjadi bagian akhir dari skripsi ini, serta berisi mengenai mata kuliah program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang relevan atau terkait dengan penelitian ini.

